

BAB V

KESIMPULAN

Pada awal pengembangan program nuklir Iran, AS merupakan negara barat pertama yang memberikan bantuan teknis untuk pengembangan Program Nuklir tersebut yang dimulai pada tahun 1957. AS bahkan memberikan reaktor nuklir pertama berkapasitas 5 Megawatt yang digunakan untuk penelitian di Pusat Penelitian Universitas Teheran.

Hubungan AS dengan Iran pernah sangat erat pada masa pemerintahan Dinasti Pahlavi, yaitu sekitar sejak tahun 1941 – 1979. Pada masa inilah Iran menjalin hubungan diplomatik resmi dengan AS. Pada tahun 1953, AS pernah membantu Reza Pahlavi untuk berkuasa penuh di Iran melalui kudeta terhadap Perdana Menteri Mohammad Mossadeq dengan bantuan skenario CIA. Setelah berkuasa, Dinasti Pahlavi kemudian membangun Iran dengan gaya kebarat-baratan. Hal inilah yang memunculkan kritik dari kaum Syiah yang dipimpin oleh Ayatulloh Khomeini. Kritik-kritik tersebut berhasil diredam dengan diasingkannya Ayatulloh Khomeini ke Irak pada tahun 1964 (Raharjo, 2012).

Berbagai upaya dilakukan oleh penduduk Iran demi mengembalikan pimpinan mereka, Ayatulloh Khomeini, dan menjatuhkan Dinasti Pahlavi. Tujuan ini tercapai setelah mereka berhasil mengembalikan Ayatulloh Khomeini ke Iran dan melakukan Revolusi Islam Iran tahun 1979 yang disertai kejatuhan masa pemerintahan Dinasti Pahlavi.

Hubungan AS dengan Iran memburuk pasca dijatuhkannya rezim Shah pada Revolusi Iran tahun 1979. Menurut pandangan masyarakat Iran, respon Barat terhadap Iran mulai berubah semenjak Iran mengganti rezim Pahlavi menjadi Republik Islam. Perubahan ini juga didukung dengan sikap Iran yang ingin melepaskan diri dari pengaruh Barat yang telah banyak mencampuri urusan dalam dan luar negeri Iran (Nikou, 2015). Hubungan Iran-AS semakin memburuk ketika terjadi Perang Teluk 1 antara Irak dan Iran, dimana AS dianggap mengizinkan Saddam Husein untuk menyerang Iran

dan mengawali perang pada tahun 1980 hingga 1988 (Raharjo, 2012).

Buruknya hubungan Iran-AS semakin menjadi ketika diberlakukannya embargo ekonomi oleh AS yang dimulai pada masa pemerintahan Bill Clinton (tahun 1995) hingga saat ini. Meskipun hubungan antar keduanya semakin memburuk sejak tahun 1979 hingga sekarang, namun ketegangan ini berhasil menghindari hal-hal yang merugikan seperti perang (Raharjo, 2012).

Sikap AS terhadap Iran merambat ke negara-negara barat lainnya, seperti Jerman, Perancis, Inggris, dan lainnya. Sikap ini pula yang memulai munculnya konflik antar Iran dengan negara barat. Dimulai dengan kecurigaan terhadap Iran sejak diteruskannya aktifitas nuklir Iran setelah revolusi. Negara Barat, khususnya AS mulai mencurigai Iran sebagai negara yang sedang mengembangkan senjata nuklir. Pada tahun 1998, pemerintah AS menentang pengembangan program nuklir Iran kembali dilakukan dengan alasan Iran dianggap memiliki potensi untuk membuat senjata nuklir dengan dukungan yang cukup dari cadangan minyak dan gas yang memadai.

Beberapa upaya dilakukan AS untuk menghentikan pengembangan nuklir Iran. Diantaranya menekan para pemasok bagian-bagian yang berkaitan dengan komponen pengembangan program nuklir Iran, seperti Ukraina, yang mengumumkan bahwa dia tidak akan menjual turbin-turbin untuk pembangunan reaktor Buser karena tekanan dari AS.

Selain menekan para negara pemasok komponen yang dibutuhkan, AS juga membuat beberapa pengaduan kepada PBB atas kecurigaannya terhadap program nuklir Iran. Salah satunya mengenai kecurigaan atas aktifitas konstruksi gas sentrifugal dari fasilitas pengayaan uranium Iran. Konstruksi gas sentrifugal dapat memperkaya uranium dengan mengolah gas heksafluorida dengan kecepatan tinggi untuk meningkatkan konsentrasi uranium-235 isotop. Gas sentrifugal dapat memproduksi *Low Enriched Uranium* (LEU) dan *Highly Enriched Uranium* (HEU). LEU dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk pengisian reaktor nuklir, sedang HEU dapat

digunakan sebagai bahan dasar pembuatan senjata nuklir (Yanah, 2015).

Aktifitas program nuklir Iran terus berlanjut dan semakin memperlihatkan perkembangannya. Perkembangan inilah yang semakin mengkhawatirkan negara Barat. Meskipun pemerintah Iran telah menunjukkan bukti-bukti bahwa program nuklir Iran dilaksanakan dengan tujuan damai, namun oleh negara Barat program ini tetap dianggap memiliki potensi sebagai ancaman yang dapat mengancam keamanan dan perdamaian dunia.

Berbagai upaya terus dilakukan untuk menghambat perkembangan program nuklir Iran. Dalam upaya menghentikan program nuklir Iran, negara Barat melakukan berbagai hal untuk mencapai tujuan mereka. Diantaranya menebarkan berbagai macam isu negatif terkait program nuklir Iran, melakukan berbagai tuntutan dan tekanan yang dapat merugikan Iran serta negara mitra yang bekerjasama dengan Iran, serta meminta PBB untuk memerintahkan Iran agar menghentikan program nuklirnya dan mendukung negara P5+1 memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Iran (Yanah, 2015).

JCPOA adalah kesepakatan yang dijalin antara 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB (AS, Inggris, Perancis, Rusia, China) dan Uni Eropa yang diwakili oleh Jerman (selanjutnya disingkat P5 + 1). Kesepakatan ini berisikan kesediaan Iran untuk membatasi aktivitas nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi (Croft, 2013; Rozen, 2013). Pada 14 Juli 2015, JCPOA ditandatangani di Wina. Namun, hanya bertahan 3 tahun, AS menarik diri dari kesepakatan ini meskipun Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) telah menilai bahwa Iran sudah memenuhi kewajibannya sesuai yang diminta JCPOA. Menurut Trump, kesepakatan itu masih kurang lengkap karena tidak membahas masalah rudal balistik, aktivitas nuklir Iran pasca 2025, dan peran Iran di Suriah.

Pada 8 November 2016, Hilary Clinton dari Partai Demokrat, yang dipandang akan menjadi penerus kebijakan Barack Obama, terutama berkaitan dengan persoalan Timur

Tengah, ternyata kalah telak dalam pemilihan Presiden AS. Pemilu dimenangkan oleh kandidat presiden dari Partai Republik, Donald Trump. Segera dapat diduga bahwa kebijakan Donald Trump terhadap Iran kurang lebih sejalan dengan kebijakan yang pernah diberlakukan oleh George W. Bush dikarenakan keduanya berasal dari partai dan basis pendukung yang sama.

Satu setengah tahun kepemimpinannya, Trump menawarkan dua opsi kepada Kongres AS, yaitu untuk merevisi isi JCPOA atau mengakhiri kesepakatan nuklir dengan Iran. Alasan yang disampaikan Trump adalah adanya ancaman dari rudal balistik yang tengah dikembangkan Iran, perlunya sanksi kepada Garda Revolusi Iran (pasukan bersenjata Iran), dan adanya masa kadaluarsa pada pembatasan pengembangan nuklir Iran, yaitu setelah 2025 Iran tidak lagi dibatasi dalam mengembangkan teknologi nuklir. Menurut Trump, JCPOA harus direvisi dengan memasukkan ketiga hal itu, atau dibatalkan sama sekali.

Tepat pada tanggal 8 Mei 2018, Presiden AS, Donald Trump, menyatakan bahwa AS secara resmi keluar dari kesepakatan *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA). Trump mengklaim bahwa JCPOA adalah “kesepakatan sepihak yang seharusnya tidak pernah dibuat” dan menegaskan akan kembali menetapkan sanksi untuk Iran.

Berikut alasan keluarnya Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir. Yaitu faktor politik dalam negeri, Kondisi Ekonomi dan Militer dan Konteks Internasional.

A. Faktor Domestik Alasan Parpol Republik yang mendukung Donald Trump keluar dari perjanjian JCPOA

AS mengalami dinamika politik internal pada 2016. Pada 8 November 2016, Hilary Clinton dari Partai Demokrat, yang dipandang akan menjadi penerus kebijakan Barack Obama, terutama berkaitan dengan persoalan Timur Tengah, ternyata kalah telak dalam pemilihan Presiden AS. Pemilu dimenangkan oleh kandidat presiden dari Partai Republik, Donald Trump. Segera dapat diduga bahwa kebijakan Donald

Trump terhadap Iran kurang lebih sejalan dengan kebijakan yang pernah diberlakukan oleh George W. Bush dikarenakan keduanya berasal dari partai dan basis pendukung yang sama.

Presiden AS, Donald Trump, menarik AS keluar dari JCPOA. Langkah Trump dikritik berbagai pihak, termasuk oleh Direktur IAEA dan negara-negara Eropa. Setahun sebelumnya, Trump telah berjanji kepada PM Israel, Netanyahu bahwa ia tidak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir. Kepentingan nasional AS selalu paralel dengan kepentingan nasional Israel. Bahkan prioritas utama kepentingan nasional AS adalah menjaga keamanan Israel.

B. Kondisi Ekonomi dan Militer

Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang menurun. Pada saat kesepakatan Nuklir Iran, Iran kembali menjadi salah satu eksportir minyak terbesar dunia tahun 2016, AS dan negara sekutunya mencabut sanksi ekonomi sebagai pertukaran atas pengekangan program nuklir Iran.

Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki tingkat kekuatan militer, ekonomi, dan politik serta teknologi yang tinggi. Pasca Perang Dunia II dan Perang Dingin, Amerika Serikat menjadi negara yang menguasai aspek perindustrian, bahkan menjadi pusat teknologi dunia pasca perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Dan setelah keruntuhan Uni Soviet, Amerika Serikat menduduki posisi tertinggi yaitu sebagai satu-satunya negara adidaya di dunia.

C. Konteks Internasional

Faktor Israel di Timur Tengah merupakan alasan utama keputusan Trump. Pasca Perang Dingin, AS muncul sebagai poros utama kekuatan dunia. Imbasnya, dalam berbagai dinamika global dunia mulai tahun 1991 (setelah keruntuhan Uni Soviet), AS berhasil mengintervensi kebijakan negara-negara lain, terutama negara-negara yang sedang berkembang, termasuk negara yang terletak Timur Tengah. Invasi militer AS di Irak, Afghanistan, Libya dan beberapa negara berkembang lainnya, menunjukkan ambisi AS untuk mendominasi dunia, khususnya di Timur Tengah.

Dewan Keamanan PBB mengusulkan draft resolusi yang menyesalkan keputusan Trump. Namun draft ini diveto oleh AS, meskipun disetujui oleh 14 anggota Dewan Keamanan lainnya (4 anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap). Di dalam draft tersebut dicantumkan bahwa segala keputusan untuk mengubah status dan komposisi kota suci Yerusalem tidak memiliki efek hukum, tidak berlaku, dan harus dibatalkan sesuai dengan resolusi yang relevan dari Dewan Keamanan (PBB, 2017).